Pranatan Anyar

KR-ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras/pri

VAKSIN COVID-19: Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin Covid-19 dari Sinovac, China, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/12) dini hari.

VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PRIORITAS

Tidak Asal Hantam Merata

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan vaksin Covid-19 akan diprioritaskan pemberiannya kepada beberapa kelompok. Pertama, mereka yang bekerja di garda depan seperti petugas medis dan petugas lapangan. Kedua, kelompok risiko tinggi seperti mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta dan usia lanjut. Dan ketiga, kelompok risiko dari *contact tracing* dan keluarga dari kontak kasus.

Selain mempertimbangkan kelompok prioritas, Muhadjir menegaskan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, vaksinasi harus memperhatikan latar geospasial dan lokasi dimana kemungkinan terjadi penumpukan partikel virus. "Presiden meminta agar hal tersebut betul-betul diperhatikan dalam proses vaksinasi, sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam merata. Tetapi betul-betul terseleksi berdasarkan siapa yang paling berada di garda depan, yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi, maupun sebagai penyebar," papar Muhadjir di Jakarta, Selasa (8/12).

Dikatakan, tujuan vaksinasi adalah untuk mengurangi risiko kesehatan sampai risiko sosial ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19. "Tujuan vaksinasi untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan, serta untuk mendorong produktivitas ekonomi dan meminimalisasi dari akibat menurunnya hibernasi ekonomi di Indonesia," katanya.

Vaksin Covid-19 produksi perusahaan farmasi asal China Sinovac Biotech telah tiba di Indonesia pada Minggu (6/12). Tahap pertama kedatangan Vaksin Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis vaksin siap suntik. Sementara, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik lain yang tiba pada Januari 2021.

Menurut Menko PMK, prioritas geospasial dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tingkat keterpaparan Covid-19 di wilayah-wilayah Indonesia tidak merata dengan intensitas yang sama. Karena itu, pemetaan pemilihan lokasi untuk vaksin perlu diperhatikan dengan saksama. "Juga dipertimbangkan tingkat mobilitas penduduk, dari satu tempat ke tempat lain," ujarnya.

Terkait prasyarat kehalalan vaksin Covid-19 Sinovac, Muhadjir menuturkan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) selaku Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terus berkoordinasi dengan Sinovac dan Bio Farma, untuk melanjutkan kajian aspek kehalalan penggunaan vaksin.

Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, pemerintah hanya menyediakan vaksin Covid-19 yang terbukti aman dan lulus uji klinis sesuai rekomendasi WHO. "Pengisian dokumen vaksin *arrival report* dilakukan dengan lengkap dan benar, sesuai hasil pemeriksaan fisik vaksin. Pemeriksaan fisik barang harus dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga kita yakin bahwa status vaksin yang diterima dalam kondisi baik," terang Terawan.

Disampaikan, vaksin tersebut segera mendapat Persetujuan Penggunaan pada Masa Darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikat kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). **(Sim/Ati)-d**

TEMAN BUS TEGAKKAN PENERAPAN PROKES

Dorong Perkembangan Ekonomi dan Pariwisata

YOGYA (KR) - Kendati masih dalam tahap uji coba, kehadiran layanan Teman Bus di tengah pandemi Covid-19 mulai dirasakan masyarakat. Hadirnya Transportasi umum Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman (Teman Bus) sangat dinantikan masyarakat perkotaan khususnya di Yogyakarta. Selain bebas biaya (gratis) hingga 31 Desember 2020, rute Teman Bus juga terkoneksi dengan Bandara Adisutjipto serta wilayah-wilayah lainnya di Yogyakarta seperti Pusat Kuliner Belut Godean dan Pasar Pakem Sleman.

"Teman Bus merupakan implementasi Program *Buy The Service* Kementerian Perhubungan dalam menunjang mobilisasi masyarakat dengan mode bus medium berkapasitas 40 penumpang (duduk dan berdiri)," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Drs Budi Setiyadi SH MSi, Selasa (8/12). Menurut Budi Setiyadi, Teman Bus juga merupakan upaya mendorong sektor ekonomi dan pariwisata di Yogyakarta di tengah pandemi Covid-19. Kemenhub bekerja sama dengan Trans Jogja yang menjadi operator untuk menjalankan skema pembelian layanan bersubsidi ini.

Di masa pandemi ini Teman Bus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat, yakni mewajibkan penumpang memakai masker, *social distancing*, menjaga kapasitas kendaraan 50 persen dan disediakan juga *hand sanitizer* di dalam bus.

Budi Setiyadi mengucapkan terima kasih atas respons masyarakat yang sangat bagus terhadap program ini. Hingga saat ini Teman Bus telah mencapai lebih dari 1 juta perjalanan pelanggan dan juga telah disiapkan 44 armada bus yang akan melayani perjalanan penumpang khusus di Yogyakarta. "Kami optimis dengan hadirnya moda transportasi yang aman dan nyaman seperti ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang beralih ke moda transportasi publik, yang saat ini masih gratis," kata Budi Setiyadi.

Di Yogyakarta, Teman Bus melayani rute Koridor 1 Godean (Pusat Kuliner Belut Godean Sleman-Terminal Ngabean Yogya), Koridor 2 Ngaglik (Terminal Pakem-Terminal Condongcatur Sleman), dan Koridor 3 Ngemplak (Pasar Pakem Sleman-Halte Trans Jogja Bandara Adisutjipto).

Budi Setiyadi menargetkan program ini akan hadir di 10 kota seluruh Indonesia dengan tambahan Kota Makassar, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, dan Banyumas sampai 2021 diharapkan Program BTS di lima wilayah Indonesia yang sudah direncanakan, nantinya dapat dikembangkan di kota-kota lain pada tahun depan.

Kemenhub menetapkan beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilakukan operator agar layanan Teman Bus memiliki kualitas dan pelayanan yang prima. Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keteraturan menjadi enam kunci utama pelayanan Teman Bus. Fasilitas Teman Bus dibekali peralatan canggih Internet of Things (IoT) seperti CCTV, reader kartu nontunai, sensor penghitung jumlah penumpang, sensor alarm pada pengemudi untuk mendeteksi jika ada pelanggaran. **(San)-d**

SUKSESKAN PILKADA DI MASA PANDEMI

Kesehatan dan Keamanan Jadi Prioritas

YOGYA (KR) - Sejumlah upaya dilakukan Satpol PP DIY untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, tidak hanya dari sisi keamanan, tapi juga penegakan protokol kesehatan (prokes). Untuk memastikan semua bisa dilaksanakan dengan baik, Satpol PP DIY menerjunkan 17.568 petugas di 6.253 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Di setiap TPS ada dua petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Di setiap Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) juga dijaga sepuluh petugas. Sedangkan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditempatkan 31 anggota. Satpol PP juga menempatkan 100 petugas di KPU Provinsi dan Kabupaten," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, Selasa (8/12).

Noviar mengatakan, untuk mengantisipasi adanya penularan kasus atau klaster baru dalam Pilkada, para petugas wajib menegakkan prokes di TPS. Karena dalam Pilkada ada 15 aturan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama berkaitan penegakan prokes. Untuk itu Saptol PP DIY menerjunkan 200 petugas di tiga kabupaten untuk melakukan patroli di masing-masing TPS.

"Saat ini yang perlu diperhatikan penegakan prokes agar bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak hanya saat pemungutan suara, tapi juga ketika penghitungan suara dan selebrasi kemenangan. Itu jadi titik fokus kita dalam pengawasan," tandas Noviar seraya menambahkan, TNI dan Polri ikut diterjunkan dalam penegakan prokes di Pilkada.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mengatakan, kasus positif Covid-19 di DIY bertambah lagi 168 kasus menjadi 7.223 kasus. Terbanyak berdomisili di Sleman 122 orang, kemudian 25 orang di Bantul, 19 orang di Kota Yogyakarta dan masing-masing satu orang di Kulonprogo serta Gunungkidul. Pasien sembuh bertambah 69 menjadi 4.944 dan korban meninggal bertambah satu kasus menjadi 154 kasus. **(Ria/Ira)-d**

Takut Stigma, Banyak yang Enggan Periksa

YOGYA (KR) - Stigma yang disematkan pada pasien positif Covid-19 membuat banyak orang enggan diperiksa dan melakukan *rapid test* maupun *swab test*. Karena umumnya masyarakat berpikir, jika mereka terbukti positif Covid-19, maka akan dikucilkan dari lingkungannya.

"Masalah stigma ini sebenarnya yang paling berat. Keengganan periksa ini lebih karena masyarakat takut stigma kalau ternyata nanti dinyatakan positif Covid-19. Takut stigma dan juga harus menjalani isolasi," ujar Tri Isnani SSos MPH, Peneliti Balai Litbangkes Banjarnegara kepada *KR* di Yogyakarta, Selasa (8/12).

Dikatakan Tri Isnani, dari penelitian yang dilakukan, pasien positif Covid-19 jika bisa menutupi kondisinya, sebisa mungkin akan ditutupi. Sedangkan yang bukan pasien, jika ditanya hanya akan menjawab normatif tidak apa-apa, meski tidak diketahui fakta sebenarnya seperti apa.

Dipaparkan, banyak contoh kejadian di masyarakat, seperti ada yang meninggal, tetangga sekitar tidak mau melayat, padahal hasil tes yang bersangkutan belum diketahui. Terdapat pula pasien yang dirawat oleh tetangganya terpaksa merahasiakan ke masyarakat sekitar, karena tetangga tersebut berjualan dan takut dagangannya menjadi tidak laku. Bahkan yang kadangkala ekstrem, jika ada tetangga yang positif Covid-19, orang lantas tidak mau lewat di jalan depan rumah pasien. "Jadi 'hukuman-hukuman' semacam itu yang membuat keengganan periksa diri. Karena mereka merasa kalau positif Covid-19 pasti akan dikucilkan," tandas Tri Isnani.

Menurutnya, stigma bisa terbangun karena banyaknya informasi yang salah (hoaks) yang beredar di masyarakat. Untuk itu Pemerintah dan semua stakeholder terkait perlu memberikan edukasi, informasi yang benar ke masyarakat. Demikian pula kampanye kepada masyarakat agar tetap menerapkan 3M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak harus masif didengungkan. **(Ret)-d**

MESKI DIBERLAKUKAN JAM MALAM

Kasus Covid-19 Masih Tinggi

PATI (KR) - Meski Pemkab Pati sudah memberlakukan jam malam, namun kasus positif Covid-19 masih saja tinggi. Bahkan korban meninggal dunia akibat Covid-19 juga tinggi. Pada Minggu (6/12) saja, tercatat ada enam jenazah yang dimakamkan dengan standar protokol Covid-19. "Jumlah korban meninggal dunia akibat Covid-19 setiap harinya berkisar 4-5 orang. Ini sangat memprihatinkan," kata Direktur LBH Advokasi Nasional Maskuri Alfathy SH, Senin (7/12).

Pemakaman jenazah korban Covid-19, Minggu (6/12), seorang perempuan warga Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, dan seorang laki-laki warga Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti. Tim Pemakaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati juga memakamkan jenazah seorang laki-laki di Cluwak, yang dikirim dari Cirebon, Jawa Barat. Lalu memakamkan jenazah seorang laki-laki di Desa Pakis, Kecamatan Tayu.

Sebelumnya, petugas memakamkan seorang jenazah di Desa Sejomulyo, Kecamatan Juwana, dan di Desa Talun, Kecamatan Kayen. "Untuk korban meninggal dunia Sabtu (5/12), ada tiga jenazah," kata petugas pemakaman, Purnama.

Kasus positif Covid-19 di Pati meningkat hingga kembali berstatus zona merah. Bupati Pati H Haryanto yang juga Ketua GTPP Covid-19 Pati pun kembali memberlakukan kebijakan jam malam mulai 5 Desember, dengan pembatasan aktivitas masyarakat pukul 22.30 WIB. **(Cuk)-d**

DPRD DIY MINTA WARGA DIY

Sukseskan Vaksin Covid-19

YOGYA (KR) - Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana meminta kepada masyarakat untuk mengikuti arahan Pemerintah terkait rencana pemberian vaksin Covid-19. Tahap awal dapat diberikan kepada yang prioritas terlebih dahulu.

"Pemberian vaksin dapat dimulai dari prioritas, kooperatif, yang mudah baru ke yang lain. Maksudnya bagaimana? Karena sampai saat ini masih ada kelompok masyarakat yang antivaksin. Apalagi ini vaksin baru. Untuk vaksin lama saja, ada yang secara tegas menolak," katanya, Selasa (8/12).

Dijelaskan Huda, vaksin ini merupakan salah satu bentuk *ikhtiar* Pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Untuk itu pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat DIY agar mengikuti program Pemerintah tersebut. Tahap awal bisa diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu. DIY menurut Huda, sudah siap untuk melakukan vaksinasi. Baik dari segi anggaran maupun petugas. "Anggaran kita sudah siap untuk vaksinasi. Bisa diambilkan dari Belanja Tak Terduga (BTT) kita yang besarannya ada Rp 66,9 miliar," ungkapnya.

Sebelumnya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY telah melakukan pelatihan terhadap vaksinator untuk Covid-19. Harapannya begitu vaksin tiba di DIY dapat segera dilakukan vaksinasi. Kebutuhan vaksin Covid-19 di DIY sekitar 2,2 juta, yang mendapatkan prioritas adalah tenaga kesehatan dan masyarakat usia produktif. **(Awh/Bro)-d**

Karanganyar Siapkan 2 Hotel untuk Karantina

KARANGANYAR (KR) - Tim Satgas Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Karanganyar memesan kamar isolasi mandiri di Hotel Ramada Colomadu dan Hotel Jawa Dwipa Karangpandan. Fasilitas eksklusif di dua hotel berbintang itu diharapkan mampu mendukung kesembuhan pasien.

Ketua Satgas Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Juliyatmono mengaku telah mengantongi kerja sama dengan Hotel Ramada Colomadu terkait sewa kamarnya bagi para pelaku isolasi mandiri (isoman). Kamar-kamar yang ditawarkan ke tamu, sebagian dipesan mulai 1 Januari 2021. Sedangkan di Hotel Jawa Dwipa, kerja sama tengah dijajaki. Untuk tiap hotel dipesan sampai 50 kamar.

Tingginya kasus Covid-19 di Kabupaten Karanganyar melatarbelakangi penyediaan fasilitas isolasi mandiri. Terlebih, disiplin mereka selama menjalani karantina diragukan. Buktinya muncul klaster keluarga yang dipicu penularan di lingkungan warga yang terinveksi.

"Peruntukannya bagi isoman yang dinilai tidak aman jika karantina di dalam rumah. Mungkin rumahnya sempit atau jumlah anggota keluarga terlalu banyak sehingga tidak aman jika isoman menjalaninya di rumah," katanya, Selasa (8/12).

Seluruh kebutuhan sewa kamar berikut logistik dan obat-obatan akan dicukupi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tim BNPB akan memeriksa dulu kelayakan hotel-hotel yang diusulkan, dalam menampung para isoman. Antara lain sterilisasinya dari lingkungan luar serta menyediakan nuansa menggembirakan. "Biayanya dari pusat. Kita mengusulkannya ke BNPB," kata Bupati Karanganyar ini.

Kebutuhan ruang isolasi mandiri di tempat eksklusif pernah dilakukan di awal pandemi Covid-19. Saat itu, para tenaga kesehatan (nakes) dipesankan kamar Hotel Taman Sari. Isolasi mandiri nakes juga pernah ditempatkan di Gedung BLK Karangpandan. Hanya saja saat itu dibiayai APBD Kabupaten. **(Lim)-d**

Muhammadiyah Ajak Sukseskan Pilkada Sehat

GROBOGAN (KR) - Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Grobogan mengajak masyarakat yang punya hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Grobogan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dengan menggunakan mobil, beberapa pemuda organisasi tersebut berkeliling dan memasang baliho berisi ajakan ke TPS tanpa perlu takut Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baliho bertuliskan *Sedulurku, Ayo Tetep Nyoblos Ning TPS, Aja Wedi Korona, Lan Aja Lali Masker, Wisuh, Lan Jaga Jarak* tersebut dipasang di tepi jalan umum yang mudah dibaca para pengguna jalan.

KR-M Taslim

Pengurus Muhammadiyah Grobogan ikut mensosialisasikan Pilkada Sehat.

"Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk dukungan kepada KPU Grobogan. Muhammadiyah juga ikut bertanggung jawab untuk pelaksanaan Pilkada Sehat. Kami memasang baliho di empat titik, yakni di kawasan perbatasan dan di kota, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak perlu takut datang ke TPS pada 9 Desember 2020," ujar PD Muhammadiyah Grobogan, Jati Purnomo, Selasa (8/12).

Pihaknya berharap masyarakat yang punya hak pilih tetap bisa datang ke TPS meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan Muhammadiyah tersebut mengandung pesan moral yakni Pilkada Sehat, artinya Pilkada tetap berjalan sukses dan sehat. **(Tas)-d**